

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Elwi Danil, (2002). *Diktat Hukum Penitensier*, Padang: Universitas Andalas.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, (2019). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.Pope, (2021). *Strategi Pemberantasan Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional,Transparansi Internasional Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Pancasila
- Moeljatno, (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Bambang Waluyo, (2004). *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, (1999). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto, (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Amir Ilyas, (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia*, Yogyakarta.
- P.A.F.Lamintang, (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Moeljatno, (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh Prasetya, (2017). *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ayu Efrita Dewi, (2020). *Modul Hukum Pidana*, Universitas Raja Ali Haji.
- Ayu Ervita Dewi, (2020). *Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Mulyati Pawennei, (2015). *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wancana Media.
- Muladi dan Barda Nawawi, (2001). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Adami Chazaw, (2012). *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada.
- M Najih, M Najih, (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press.
- R. Abdoel Djamali, (2010). *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Djayeng Tirto S, (2011), *Implementasi Kewenangan Nasional Terhadap Bahaya Korupsi di Lingkungan Aparatur Pemerintahan Guna menumbuhkan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

- Amir Ilyas, (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Sholehudin, (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Satichid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah-Kuliah*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, (2016). *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Adami Chazawi, (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Erdianto Effendi, (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, (2015). *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*
- Adami Chazawi, (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Chaerudin DKK, (2016). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- IGM Nurdjana, (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media.
- Tolib Effendi, (2020). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Scopindo Media Pustaka.
- Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor :Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2003). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim, (2010). *"Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Amirudin dan Zainal Asyikin, (2010). *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono, (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

- Johny Ibrahim, (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing.
- Rony Hanitijo Soemintoro, (1982). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sultan Remy Sjahdeni, (2007). *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi"*, Jakarta, Grafiti Pers.
- Muladi & Dwidja Priyanto, (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Cetakan ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Teguh Prasetya, (2018). *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- R.Soesilo, (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeria
- M.Yahya Harahap, (2007). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Ghalia.
- Oc Kaligis, (2006). *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Pemberantasan Korupsi*, Bandung: PT.Alumni
- Andi Hamzah, (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Tolib Effendi, (2020). *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Scopindo Media pustaka
- Aziz Syamsudin, (2011). *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

- Hotben Gultom, (2020). *"Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang no 20 Tahun 2001"*, Vol 19 No 1.
- Ridwan Arifin Oemar Syarief, (2018). *Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Republica, Vol 18 No 1.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, (2019). *"Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia"* Jurnal Supremasi Hukum Vol 3 No 2.

- Happy Febrina Haryani DKK, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol 5 No 2
- Mas Putra Zenno Januarsyah, (2017). “*Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN persero,*” Jurnal Wawasan Yuridika. Vol 1 No.1.
- Solechan, (2019). “*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik*”, Vol 2 No 4.
- Failin, (2017). “*Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*” Jurnal Cendikia Hukum, Vol 03 No 1.
- Noveria Devi Irmawanty, (2021). *Pembangunan Hukum Indonesia*, Jurnal Volume 3, Nomor 2.
- Hidayat, (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Edutech Vol. 3 No 2.
- Yaiza Putri, (2022). *Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Lampung Selatan Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No 02.
- Mochamad Ramdhan P, (2020). *Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 4 No 2.
- Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, (2016). “*Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Pidana Korupsi*”, *Open Journal Systems*, Vol 05, No. 02.
- Maryanto, (2012). “*Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*”, Jurnal Ilmiah Volume II, No. 2.
- Charlie Lumenta,(2014), *Pengawasan terhadap Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Vol. III No. 1

C. Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Putusan

Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg

E. Website/Internet

<https://bisnis.tempo.co/read/1232846/korupsi-dana-bpjs-77-miliar-2-pejabat-rsud-lembang-ditangkap> diakses pada tanggal 05/12/2021

<https://berkas.dpr.go.id/puspanlaku/keterangan/keterangan-public-36.pdf>

